

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kajian dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini. Karena berkaitan dengan Beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh PDRB, PAD dan Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka kajian pustaka yang dijadikan sebagai konsep atau penguat hasil analisis dalam penelitian diantara lain sebagai berikut:

1. Menurut penelitian terdahulu Refrian Adam (2021) penelitian mengenai “Analisis pengaruh PDRB, Belanja Modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2014-2019” dengan hasil variabel PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia. Belanja Modal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia. Dan Kemiskinan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada 34 provinsi di Indonesia.
2. Menurut penelitian terdahulu Rifa Maulidya (2021) penelitian mengenai “ Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (studi pada seluruh provinsi di Indonesia tahun 2015-2018)” dengan hasil variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Daerah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Daerah Sektor Kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Menurut penelitian terdahulu Prince Charles Heston Runtunuwu (2020) penelitian mengenai “Analisis indikator Makroekonomi dan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” dengan hasil penelitian

yaitu : 1) Variabel inflasi, pendapatan perkapita, dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Ternate. 2) Hasil uji parsial variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Ternate. 3) Hasil uji parsial variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Ternate. 4) Hasil pengujian secara parsial variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Ternate. Karena inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Ternate, maka pemerintah daerah harus membantu masyarakat yang lemah atau miskin secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Menurut penelitian terdahulu Pramesti Regita Putri (2023) penelitian mengenai “Pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Hulu Sungai Utara” Penelitian ini menunjukkan hasil akhir secara simultan, variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan secara parsial, variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak signifikan yang berarah negatif. Untuk variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan yang berarah negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah variabel tingkat partisipasi angkatan kerja karena satu-satunya yang signifikan.
5. Menurut penelitian terdahulu Zainuddin, Maryam, Cut Hamdiah, Muhammad Bakri dan Jen Surya (2022) penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh” Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dilakukan peningkatan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) karena terbukti PDRB berdampak positif terhadap IPM, yaitu setiap ada peningkatan PDRB akan diikuti kenaikan IPM. Kemudian, belanja modal (BM) perlu ditingkatkan karena BM tersebut memberi dampak positif terhadap IPM, dan pendapatan asli daerah (PAD) berhubungan negatif dengan IPM bukan berarti PAD tidak perlu ditingkatkan, tetapi sangat perlu ditingkatkan untuk menaikkan PDRB dan dengan sendirinya PAD akan mempengaruhi IPM secara positif secara tidak langsung.

Pada penelitian terdahulu di atas memiliki relevansi dengan penelitian ini yakni sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan metode regresi data panel, yang menjadi pembeda dengan keempat penelitian terdahulu terletak pada variable, waktu dan tempat yang digunakan pada penelitian ini.

## **B. Teori dan Kajian Pustaka**

### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Amartya Sen, “kelaparan terjadi bukan karena kekurangan bahan pangan namun karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi makanan”. Hal ini dikarenakan adanya sistem yang sosial yang tidak adil. Penyebab kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial seperti menurunnya upah pekerja, pengangguran, naiknya harga bahan pangan dan lemahnya mekanisme distribusi. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai “a process of enlarging people’s choice” yang berarti suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia.

Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fokus dari pembangunan suatu negara ialah

manusia, karena manusia merupakan aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya. Teori klasik Adam Smith menganggap bahwa manusia lah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi

## **2. Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut Tarigan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB dapat didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yaitu :

- a) Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/region pada satu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
- b) Pendekatan Pendapatan PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (biasanya setahun).
- c) Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun).

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian pada suatu wilayah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

- a.) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.
- b.) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap katagori dari tahun ketahun.
- c.) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukan struktur perekonomian atau peranan setiap katagori ekonomi suatu wilayah.
- d.) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB persatu orang penduduk. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara.

### **3. Pendapatan Daerah**

Pendapatan atau penghasilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha. Menurut Nasution (2009:206) dalam istilah umum pendapatan (income) adalah arus uang atau barang yang menguntungkan bagi seseorang, kelompok individu, sebuah perusahaan atau perekonomian selama beberapa waktu. Menurut Sherraden (2006:23) menyatakan bahwa pendapatan merupakan semua uang yang masuk dalam sebuah rumah tangga atau unit terkecil lainnya dalam suatu masa tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah

yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

a) Pajak Daerah Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

b) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebih dari 10(sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.<sup>6</sup> Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel.<sup>7</sup> Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

c) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>9</sup> Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

d) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>11</sup> Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut

bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

e) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

f) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

g) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

h) Pajak Parkir

i) Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung



maupun tidak langsung. Retribusi daerah dibagi dua golongan: 1) Retribusi jasa umum Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2) Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah: (1) Perizinan Tertentu Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan. (2) Perusahaan daerah Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah. Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu: (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing. (b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah. (c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah. Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti

bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

#### **4. Angkatan Kerja**

Angkatan kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan, penduduk yang telah memasuki usia kerja (*working age population*). Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab. *Angkatan kerja (labour force) secara demografi angkatan kerja bergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa. Kelompok angkatan kerja terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu:*

Angkatan kerja yang bekerja adalah Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari dan Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah pekerja tetap, petani-petani dan orang-orang yang bekerja dalam keadilan.

Angkatan kerja yang mencari pekerjaan adalah Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari/ mendapatkan pekerjaan. Mereka yang bekerja, pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Mereka yang dibebastugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. *Bukan angkatan kerja (not in the labour force) adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi, mereka bagian dari tenaga kerja yang*

sesungguhnya tidak terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari :

- Sekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah.
- Mengurus rumah tangga adalah untuk mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga mendapat upah.
- Penerimaan pendapatan adalah untuk mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan, misalnya pensiun, bunga simpanan, hasil persewaan dan sebagainya.
- Lainnya adalah untuk mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena usia lanjut, lumpuh, dungu dan sebagainya.

Tenaga kerja adalah salah satu dari faktor produksi yang penting, karena produktivitas dari faktor produksi lain bergantung pada produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan produksi. Selain itu, tenaga kerja adalah penggerak pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan output adalah dengan memperbanyak tenaga kerja. Akan tetapi peningkatan jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan peningkatan jumlah modal dan teknologi sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Salah satu indikator tenaga kerja yang mencerminkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi adalah menggunakan data TPAK. Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (demand for labor ) dan penawaran tenaga kerja (supply of labor), pada suatu tingkat upah (Kusumowidho, dalam Subri: 2003).

Berdasarkan teori Solow dan Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada kenaikan persediaan faktor-faktor seperti tenaga kerja, akumulasi modal dan teknologi. Pada teori ini rasio modal output bisa berubah jika tenaga kerja yang digunakan lebih besar maka jumlah modal yang dibutuhkan lebih sedikit tetapi jika jumlah modal yang digunakan lebih besar maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Model Pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Model ini

dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam persediaan modal, pertumbuhan dalam angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap output barang dan jasa suatu Negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Hubungan Variabel PDRB terhadap IPM**

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Mirza, 2012: 13). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

#### **2. Hubungan Variabel Pendapatan Daerah terhadap IPM**

Berdasarkan hasil penelitian oleh Adriansyah et al (2014) dan Kuspriyanto (2016) Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan di daerah tersebut. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pelayanan publik seperti perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi berarti bahwa semakin banyaknya masyarakat yang membayar pajak dan retribusi. Pajak yang dibayarkan dapat berupa pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi di Daerah tersebut. Dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Daerah, maka diharapkan akan berimbang pula terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrudin (2011) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan penduduk yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Masyarakat.

### **3. Hubungan Variabel Angkatan Kerja terhadap IPM**

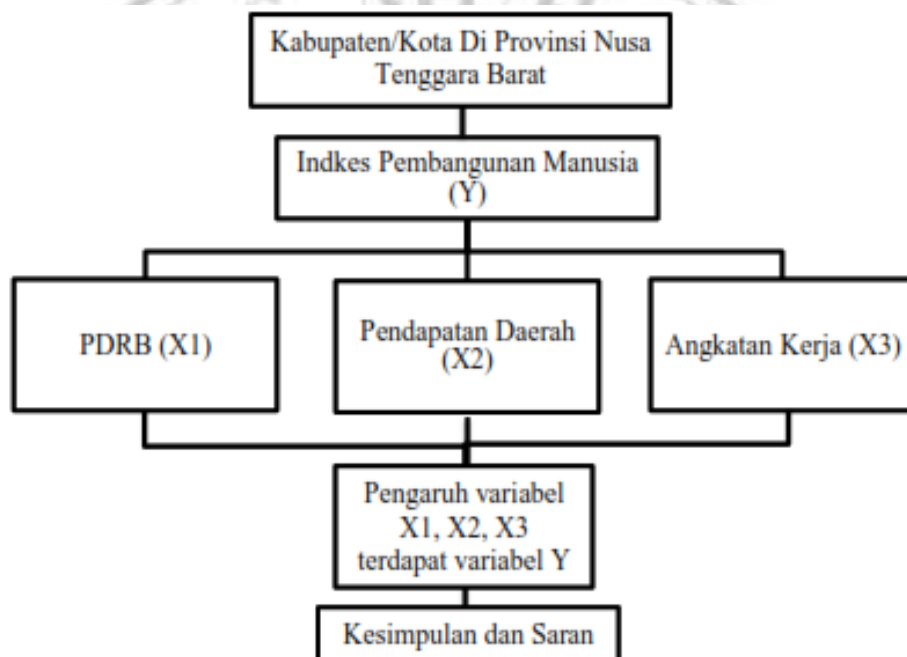
Berjalannya proses kegiatan produksi diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup. Adanya peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja mampu menyebabkan naiknya taraf pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Angkatan kerja yang ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu hal yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesulitan angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan bahwa kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja di suatu daerah dan apabila angka TPAK yang bernilai tinggi maka menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Salah satu faktor produksi yang dapat menentukan output perekonomian yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Apabila Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mampu terserap dengan baik maka dapat meningkatkan taraf hidup seseorang dikarenakan pendapatan seseorang semakin bertambah dan kemudian mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat sehingga tercapainya standar hidup layak (Melliana dan Zain, 2013). Hubungan yang diberikan dari Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Peningkatan kualitas hidup masyarakat mampu

diperoleh ketika tenaga kerja memiliki tingkat produktivitas serta pendapatan yang tinggi dengan begitu masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sehingga terciptanya Indeks Pembangunan Manusia yang baik.

#### D. Kerangka Pemikiran

IPM adalah indikator penting untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/ masyarakat/penduduk yang dipublikasikan secara berkala oleh BPS, dan IPM merupakan indikator dampak dari program 5-10 tahun sebelumnya.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis**



Keterangan :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, Pendapatan Daerah dan Angkatan Kerja terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan data sekunder tahun 2017-2021 yang berasal dari instansi Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan eviews 9 sebagai alat tenaga penelitian. Selanjutnya akan diketahui bagaimana pengaruh PDRB, Pendapatan Daerah dan Angkatan Kerja

terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat lalu akan memberikan informasi kesimpulan dan saran.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian Dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut :

H0 : PDRB tidak berpengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H1 : PDRB berpengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H0 : Pendapatan Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H2 : Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H0 : Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H3 : Angkatan Kerja berpengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.